

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

**Judul** : Strategi Pemerintah Desa Sardonoarjo dalam Mewujudkan Desa Antipolitik Uang  
**Nama** : Anjas Setiaji  
**NIM** : 15401241034  
**Prodi** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 21 April 2021

Reviewer Pembimbing

Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003041986012001

Dr. Sunarso, M. Si.  
NIP. 196005211987021004

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

## STRATEGI PEMERINTAH DESA SARDONOHARJO DALAM MEWUJUDKAN DESA ANTIPOLITIK UANG

### *SARDONOHARJO VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY IN MAKING ANTI-POLITICAL VILLAGE MONEY*

by: Anjas Setiaji dan Sunarso

anjas.setiaji2015@student.uny.ac.id

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Pemerintah Desa Sardonoarjo dalam

Mewujudkan Desa Anti Politik Uang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu bawaslu, kepala desa Sardonoarjo, sekretaris desa Sardonoarjo, kelompok warga strategis desa Sardonoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross check sumber dan teknik, yang kemudian di analisis melalui tahapan reduksi data, peyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan desa Sardonoarjo dalam mewujudkan desa anti politik uang adalah program strategy (strategi program), beberapa strategi diantaranya adalah melalui peraturan kepala desa Sardonoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Anti Politik Uang, memberikan penyuluhan secara lisan kepada masyarakat, membuat publikasi secara tertulis, pemantauan terhadap kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sardonoarjo dalam upaya mewujudkan desa anti politik uang yaitu di dasarkan pada sumber daya manusia (SDM) yang beragam, sosial budaya di masyarakat, faktor pendidikan yang beragam dan minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa maupun dari bawaslu. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah desa Sardonoarjo dalam mewujudkan desa anti politik uang yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai politik uang, bekerjasama dengan organisasi masyarakat yang ada di desa Sardonoarjo, menyosialisasikan secara berkala melalui publikasi secara tertulis dan meminimalisir anggaran dalam setiap kegiatan anti politik uang.

Kata kunci: Strategi, Anti Politik Uang

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe the Sardonoarjo Village Government's Strategy in Realizing an Anti- Money Political Village.*

*This research is a descriptive study with a qualitative approach. The subjects in this study were Bawaslu, the head*

*of the village of Sardonoarjo, the secretary of the village of Sardonoarjo, a group of strategic residents of the village of Sardonoarjo. Data collection techniques using interviews and documentation. The technique of checking the validity of the data uses a cross check of sources and techniques, which are then analyzed through the stages of data reduction, data presentation and verification.*

*The results of the study show that the strategy used by the village of Sardonoarjo in realizing an anti-money politics village is a strategy program, several strategies including through the regulation of the village head Sardonoarjo Number 1 of 2019 concerning the Village Anti Money Politics, providing oral counseling to the community, making publication in writing, monitoring of campaigns conducted by legislative candidates. The obstacles faced by the village government of Sardonoarjo in an effort to create an anti-money politics village are based on various human resources (HR), socio-culture in the community, various educational factors and the lack of budget issued by the village government and from Bawaslu. The solution to overcome the obstacles faced by the Sardonoarjo village government in realizing an anti-money politics village is by providing an understanding to the community about money politics, collaborating with community organizations in Sardonoarjo village, periodically socializing through written publications and minimizing the budget for any anti-money politics. money politic.*

**Keywords:** Strategy, Anti Money Politics

## PENDAHULUAN

Negara republik dengan sistem pemerintahan yang mengagungkan konsep demokrasi selama ini dianggap sebagai bentuk ideal dan suatu negara (Mansyur Semma, 2008: 175). Sama halnya dengan negara republik lainnya, negara kita selama ini juga telah mencoba untuk menjunjung tinggi konsep demokrasi dimana kedaulatan tertinggi sepenuhnya berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 pada pasal 1 ayat (2) yakni, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu cara yang sering digunakan untuk mengetahui demokratis atau tidaknya suatu negara, biasanya didasarkan pada keberadaan pilar-pilar demokrasi. Diane Ravicth (Ajat Sudrajat, 2011: 59) mengungkapkan pilar-pilar demokrasi tersebut antara lain yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dan yang diperintah (rakyat), kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerjasama, dan mufakat.

Menegakkan demokrasi di suatu negara bukan suatu perkara yang mudah, banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh setiap negara. Dari beberapa pilar demokrasi yang ada, satu yang menjadi sorotan utama yang sering kali dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi, yaitu pemilu. Banyak para ahli yang beranggapan bahwa hasil pemilu yang diselenggarakan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dinilai cukup akurat dalam mencerminkan aspirasi serta partisipasi masyarakat (Cholisin, 2013: 136).

Menegakkan demokrasi di suatu negara bukan suatu perkara yang mudah, banyak sekali hambatan yang harus dihadapi oleh setiap negara. Dari beberapa pilar demokrasi yang ada, satu yang menjadi

sorotan utama yang sering kali dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi, yaitu pemilu. Banyak para ahli yang beranggapan bahwa hasil pemilu yang diselenggarakan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dinilai cukup akurat dalam mencerminkan aspirasi serta partisipasi masyarakat (Cholisin, 2013: 136).

Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia selama ini dianggap telah berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti telah mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Namun faktanya, masih banyak hambatan yang menghalangi penyelenggaraan pemilu agar menjadi pemilu yang bersih, jujur dan adil. Menghalangi disini maksudnya bukan dalam arti pelaksanaan pemungutan suaranya, tetapi halangan-halangan yang menyebabkan belum berkembangnya kesadaran politik negara untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pemimpin dimasa depan, halangan menumbuhkan pemilih yang cerdas dan rasional, juga halangan-halangan berupa banyaknya kecurangan yang dilakukan para peserta pemilu menjelang diadakannya pemungutan suara seperti adanya praktik *money politic* dan sebagainya.

Politik uang (*money politic*) selama ini telah menjadi bagian dari proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia (Setyawan dan Adiwidjaja, 2013: 90). *Money politic* memiliki kaitan yang erat dengan suap. Hal ini tidak terlepas dan adanya fakta bahwa tujuan utama *money politic* adalah untuk menyogok pemilik suara agar mau memilih si pemberi uang. Istilah gampangnya, tujuan *money politic* adalah pembelian suara dalam pemilu. Secara tertulis *money politic* secara tegas memang dilarang untuk dilakukan, namun dalam realitanya praktik ini sangat sulit untuk dihilangkan. Survey yang dirilis Charta Politika pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 51,8% responden menyatakan akan menerima politik uang meskipun belum tentu akan memilih calonnya, 17,8% menyatakan akan

menerima dan memilih calon yang memberikan sejumlah uang, 25,4% akan menolak politik uang, sisanya sebanyak 5% tidak menjawab (Arief Fadly, 2014, Lebih dari 50% Masyarakat Tertarik Politik Uang).

Peluncuran Desa Antipolitik Uang merupakan kegiatan strategis Bawaslu karena masyarakat desa dinilai rentan dalam persoalan politik uang. Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu desa yang menjadi sampel sebagai desa anti money politic. Penentuan desa anti money politic dilaksanakan ketika Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) bersama dengan Pemerintah Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan Bawaslu kabupaten Sleman bersepakat membentuk Desa Anti Politik Uang (APU). Gerakan anti money politic di desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman diinisiasi oleh Kepala Desa (Kades) Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Ngaglik, Sleman ingin melakukan pertemuan dengan para caleg untuk dapil Ngaglik. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membentuk komitmen mereka agar mereka tidak melakukan politik uang. Satu dari beberapa langkah awal untuk menginisiasi gerakan tersebut, Harjuno menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman

Penyalahgunaan uang dalam pemilu menjadikan sulit diwujudkannya pemilihan umum yang sesuai dengan asas-asas pemilu yaitu bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menghambat adanya persaingan yang fair. Politik uang sudah menasar di tingkat bawah seperti di desa, kelurahan atau di tingkat dusun dusun. Pemerintah Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mengupayakan tercapainya desa Antipolitik Uang dimulai dari bawah, sejumlah kantong-kantong yang biasanya menjadi lumbung aksi politik uang harus dikuatkan agar mereka melakukan perlawanan. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul "Strategi Pemerintah Desa Sardonoarjo dalam Mewujudkan Desa Anti Politik Uang."

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan maupun menjawab persoalan-persoalan dari segala fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, baik berupa fenomena variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan dari berbagai variabel (Zainal Arifin, 2011: 54). Hadari (2010: 63) mendefinisikan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan pada suatu subjek dan objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya interpretasi data dan analisis data.

Pendekatan kualitatif (Moleong, 2014: 6), yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, maupun motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud berbagai metode ilmiah yakni penelitian yang menggunakan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan maupun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen untuk menafsirkan fenomena yang akan di teliti. Sedangkan menurut Creswell (2015: 31), penelitian kualitatif adalah penelitian suatu proses penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial-budaya dengan menyajikan informasi atau data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu tanpa intervensi dari peneliti.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kehidupan sosial- budaya yang sedang terjadi di masyarakat yang berguna untuk menggambarkan atau

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata yang sistematis, obektif dan tentunya akurat tanpa ada manipulasi didalamnya, sesuai dengan konteks waktu dan situasi yang ada. Penelitian ini digunakan untuk meneliti realitas kejadian sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka diharapkan penelitian ini dapat memperoleh dan menghasilkan informasi berupa data deskriptif yang mendalam tentang strategi pemerintah desa dalam mewujudkan desa anti politik pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Data yang diperoleh tersebut nantinya akan berguna dalam menghasilkan penelitian yang bermakna.

#### **Waktu dan Tempat Penelitian**

- a. Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
- b. Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan terhitung semenjak dilakukan pra-penelitian pada 20 Juli 2020– 28 Agustus 2020.

#### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini ditentukan oleh penulis berdasarkan dari kriteria yang telah dibuat. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka pemilihan subyek penelitian dalam penelitian kualitatif ini telah ditentukan sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan yaitu dengan menggunakan teknik purposive. Menurut Herdiansyah (2010: 106) teknik purposive merupakan teknik pengambilan data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Tidak semua orang dapat menjadi subjek dalam penelitian ini. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan, oleh karena itu penulis memilih teknik purposive dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat kriteria yang

digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Pihak yang terlibat dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Tahun 2019,
2. Pihak yang meresmikan Desa Sardonoarjo sebagai Desa Anti Politik Uang Tahun 2019.

Maka subjek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bapak M Abdul Karim Mustofa selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sleman;
2. Bapak Harjuno Wiwoho selaku Kepala Desa Sardonoarjo;
3. Bapak Achmad Wawan selaku Sekertaris Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;
4. Nur Subekti selaku Relawan Desa Anti Politik Uang Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;
5. M. Taufik, warga masyarakat desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman;
6. Alivia Santi, warga masyarakat desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

#### **Prosedur**

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi kata-kata. Pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam penelitian. Agar permasalahan dan dapat membuktikan hipotesis yang telah dibuat, maka diperlukan data-data yang sekiranya mendukung dan dapat menunjang peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Oleh karenanya, penentuan teknik dan pembuatan instrumen perlu dilakukan. Sehingga teknik yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan satu lagi sebagai pihak yang ditanyai atau terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang

ditanyakan oleh pewawancara. Kegiatan wawancara ini tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu salah satunya untuk menggali informasi (Moleong, 2014: 186). Esterberg (Sugiyono, 2014: 233) membedakan bentuk bentuk wawancara kedalam tiga macam bentuk yakni wawancara tersruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara bentuk terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan jelas dan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Bentuk wawancara ini cenderung kaku karena pertukaran informasi antara pewawancara dan terwawancara sangat minim. Sehingga, peneliti sudah menyiapkan instrumen pertanyaan yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis serta alternatif jawaban pun telah disiapkan. Sedangkan, bentuk wawancara semiterstruktur lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam wawancara semiterstruktur peneliti lebih bebas dan dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dalam hal ini informan akan bisa lebih terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dan informan akan lebih leluasa dalam mengemukakan pendapat dan ide-ide yang akan disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan diajukan kepada terwawancara tidak terstruktur dan cenderung lebih terbuka.

Dalam wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman secara tersruktur untuk melakukan wawancara. Pewawancara hanya akan mengungkapkan pertanyaan berdasarkan garis besar pertanyaan yang akan di tanyakan berdasarkan apa yang akan diteliti. Biasanya bentuk wawancara ini digunakan oleh peneliti yang belum mengetahui secara pasti dan jelas terkait data yang akan diperoleh ketika penelitian, sehingga dengan wawancara tidak terstruktur peneliti akan mendapatkan gambaran secara jelas, lengkap dan mendalam.

Penelitian ini akan menggunakan bentuk wawancara semiterstruktur.

Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara untuk menanyakan pertanyaan kepada informan. Dimana ketika wawancara berlangsung peneliti dapat mengajukan dan mengembangkan pertanyaan secara fleksibel dengan tetap berpedoman pada batasan masalah yang telah dirumuskan, sehingga informasi yang diperoleh dapat mendalam. Selain membawa pedoman wawancara, dalam penelitian ini pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu lainnya yang sekiranya akan membantu memperlancar dalam perolehan data seperti alat rekam mengenai masalah yang di teliti yaitu tentang strategi pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik pada pemilihan umum serentak tahun 2019.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pencarian dokumen untuk mempermudah dan menunjang penelitian. Menurut Sugiyono (2014: 240) dokumen merupakan data-data atau catatan yang telah terjadi atau telah berlalu, yang dalam hal ini bentuk dari dokumen bisa berupa arsip, tulisan, gambar, atau berupa karya-karya dari seseorang. Diharapkan dengan digunakannya teknik pengumpulan data dokumen ini dapat memperkuat hipotesis peneliti sehingga data yang di sajikan bisa dianggap layak dan kredibel. Selain itu, jika kita mengacu pada pendapat Moleong (2014: 217) dalam penelitian kualitatif, dokumen merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk menafsirkan, menguji dan juga dapat memperkirakan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang tengah di teliti.

Dokumen terdiri dari bentuk, yaitu dokumen resmi dan dokumen pribadi. Dokumen resmi biasanya berupa dokumen internal seperti halnya memo, pengumuman, instruksi, maupun aturan dari lembaga masyarakat tertentu yang berupa keputusan pimpinan kantor, laporan rapat, dan sebagainya yang digunakan untuk kalangan sendiri. Sedangkan, dokumen pribadi merupakan karangan

atau catatan yang dibuat oleh seseorang, catatan maupun karangan tersebut dapat berupa pengalaman, tindakan, dan kepercayaan. Contoh dari dokumen pribadi yaitu surat pribadi, catatan harian, dan autobiografi. Selain menggunakan dokumen resmi dan dokumen pribadi, penelitian ini juga dapat menggunakan dokumen eksternal seperti majalah, berita maupun buletin. Dokumen eksternal ini dapat digunakan peneliti untuk menganalisis konteks sosial di masyarakat (Moleong, 2014: 218-219).

Penelitian ini menggunakan dokumen seperti foto kegiatan, gambar, serta data-data mengenai politik uang di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Ngaglik, Sleman..

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Agar data yang diperoleh pada penelitian ini dapat memiliki derajat kepercayaan maka digunakanlah cross check atau uji silang sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Cross check adalah strategi pengumpul data ganda pada objek yang sama untuk menguji tiap temuan dan mengeliminasi interpretasi-interpretasi yang tidak akurat (Burhan Bungin, 2012: 140). Pemeriksaan keabsahan data dengan cross check bertujuan untuk menghindari bias data dan interpretasi berbeda-beda yang dapat menimbulkan multitafsir. Dasar pertimbangan dalam pemilihan cross check sebagai pemeriksaan keabsahan data adalah data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara perlu dicek, diuji atau dikuatkan dengan data yang tertuang dalam bentuk dokumen sehingga data yang diperoleh memiliki derajat kepercayaan atau menjadi absah. Oleh karena itu supaya memperoleh derajat kepercayaan atau menjadi absah, cross check dilakukan dengan cara mengecek, membandingkan, dan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian dengan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen.

Melalui cross check dapat diperoleh data yang akurat, yakni data hasil wawancara yang didukung dengan data hasil dokumentasi memiliki makna yang sama sehingga derajat kepercayaan tercapai.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Moleong (2014: 248), analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Selain itu, Susan Stainback juga mengungkapkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang kritis, teknik ini digunakan untuk menganalisis dan memahami hubungan dan konsep dalam data yang diperoleh, sehingga data dapat dikembangkan dan di evaluasi nantinya (Sugiyono, 2014: 244).

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli yang ada, Sugiyono (2014: 244) menyimpulkan bahwa analisis data merupakan satu proses untuk menemukan dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun dari dokumentasi dengan cara mengorganisirnya ke dalam beberapa kategori kelompok, atau menjabarkannya ke dalam beberapa unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting yang kemudian akan dipelajari, serta menyimpulkannya

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan dari fakta-fakta yang khusus, menjadi kesimpulan secara umum (Generalisasi). Penyimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif secara jelas dan terstruktur.

Adapun tahapan yang akan digunakan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini merujuk pada analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 247-252) yang mana tahapan dari analisis data tersebut yaitu sebagai berikut.

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data-data yang diperoleh dari lapangan tentunya cukup banyak, untuk itu agar data yang diperoleh bisa terangkum semua, perlu dicatat atau ditulis secara teliti dan rinci. Mereduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja yang ingin diteliti, serta mencari pola dan temanya. Kegiatan ini dilakukan karena banyaknya data yang diperoleh jika di catat secara teliti dan rinci dan kemudian di reduksi akan mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran atau garis besar yang lebih jelas serta akan memberikan kemudahan jika nantinya diperlukan data tambahan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan untuk memfokuskan data mengenai strategi pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Semua data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi di kelompokkan dan klasifikasikan sesuai dengan kategorinya.

### 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data-data yang diperoleh direduksi, kemudian tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Data-data yang telah di sederhanakan dan dipilih kemudian disusun secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu dapat berupa grafik, chart, pie, dan jenis jenis yang lain. Penyajian dapat juga dilakukan dengan model uraian, bagan atau hubungan antar kategori. Penyajian data yang seperti itu akan memudahkan peneliti dalam memahami data karena data yang disajikan telah terorganisir dengan rinci dan teliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data berupa teks yang bersifat naratif berupa informasi mengenai strategi pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik pada pemilihan umum serentak tahun 2019.

### c. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan bagian terakhir dari proses analisa data. Namun, data yang dihasilkan masih dalam bentuk data sementara, karena jika dalam pengumpulan data lanjutan tidak di ditemukan data yang dapat mendukung hipotesis maka bisa saja data yang akan diperoleh akan berubah. Akan tetapi jika dalam penarikan kesimpulan ditemukan data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang telah di jelaskan di awal adalah kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan mengarah pada jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara kepada bawaslu, kepala desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, sekretaris desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, kelompok strategis desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan warga masyarakat Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini didasarkan pada faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yaitu mengenai strategi pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik uang, kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan desa anti politik uang, dan solusi dalam menghadapi kendala yang

ada. Hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Strategi Pemerintah Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Desa Anti Politik Uang

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden, strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk mewujudkan desa anti politik uang cukup beragam. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain mengeluarkan peraturan kepala desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Anti Politik Uang, sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi dengan media cetak. Hasil wawancara dengan kepala desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman diketahui bahwa strategi khusus yang disiapkan oleh pemerintah Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yaitu dengan mendeklarasikan desa anti politik uang.

Berdasarkan pernyataan kepala desa diketahui bahwa gerakan anti politik uang di desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman diinisiasi oleh semangat warga dan beberapa kelompok masyarakat di desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk mewujudkan desa anti politik uang. Mereka beranggapan bahwa politik uang sudah cukup mengkhawatirkan dikarenakan para caleg memberikan uang atau barang berkedok bantuan agar bisa memilih dirinya saat pemilu dilaksanakan. Beberapa langkah yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pertemuan dengan para caleg yang bertujuan untuk membentuk komitmen mereka agar mereka tidak melakukan politik uang. Dengan adanya pertemuan itu, desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman membuat Deklarasi desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sebagai desa anti politik uang yang dilakukan oleh dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019.

Kepala Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman

menyatakan deklarasi ini penting dilakukan karena politik uang sudah membudaya di masyarakat. Langkah ini adalah bentuk pemerintah desa untuk memberikan kesadaran baru tentang demokrasi dan politik ke seluruharganya. "Jangan sampai (politik uang) mencederai pemilu yang sehat nanti. Kita harus punya demokrasi dan politik yang bermartabat untuk Indonesia lebih baik ke depan," terang kepala desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Berdasarkan dari beberapa pernyataan tersebut maka dibutuhkan langkah selanjutnya agar dapat diterapkan kepada masyarakat, agar budaya politik uang yang ada di desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman berkurang.

#### a. Kondisi umum dan strategi dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kondisi umum yang ada di desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sebagian besar pemilih telah meyarakan hak pilih mereka dari jumlah pemilih sebanyak 19.476 jiwa. Pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya sebanyak 17.651 pemilih. Sisanya sebanyak 1.825 pemilih merupakan jumlah yang belum menyalurkan hak pilihnya, dikarenakan sebagian penduduk tidak mengetahui siapa calon legislative dan tidak mengetahui visi misi calon tersebut dan beberapa masyarakat adalah lansia yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Hasil wawancara selanjutnya kepada para warga yang menyalurkan hak pilihnya menyatakan jika mereka menggunakan hak pilihnya murni kesadaran dari diri mereka untuk tidak golput. Selama pemilu 2019, tidak banyak caleg yang bersosialisasi di desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, hanya beberapa calon saja, karena mereka takut untuk masuk ke desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Di desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman ada juga sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang yaitu sosialisasi melalui perkumpulan atau

kegiatan warga masyarakat desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

Hasil pemaparan warga masyarakat diketahui pada Pemilu Tahun 2014 beberapa kampanye caleg DPRD yang memberikan sesuatu dengan kedok bantuan berupa barang ataupun uang tunai, yaitu berupa kaos, sembako, dan juga ada yang membagikan sejumlah uang. Hal tersebut merupakan tindakan politik uang yang dilakukan oleh caleg tertentu. Meskipun demikian warga mengaku jika mereka tidak terikat dengan pemberian yang di janjikan oleh caleg-caleg tersebut.

Sebagai lembaga pemerintahan, pihak Bawaslu dan pemerintah desa mengupayakan agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan politik uang lebih luas lagi. Hal tersebut dikarenakan politik uang ini akan mengganggu stabilitas kejujuran dalam pemilu. Bawaslu menyatakan “Kami bekerjasama dengan masyarakat dan juga pemerintah desa, dan kebetulan kita dibantu oleh LSM, ponpes, pengurus NU, karang taruna dan kelompok juga perangkat dusun seperti bapak kadus dan juga jajaranya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan jika desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mengupayakan desa anti politik uang mengajak semua kalangan masyarakat untuk membuat strategi dalam mencegah terjadinya politik uang.

#### b. Strategi dalam bentuk Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan bawaslu dan juga pemerintah desa diketahui bahwa strategi dan program yang dicanangkan berjalan dengan baik. Mereka membuat poin-poin kegiatan yang akan dilakukan untuk mencegah kegiatan politik uang di desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Jadwal kegiatan ini berupa sosialisasi kepada masyarakat di desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Strategi yang di rencanakan yaitu pendekatan kepada masyarakat agar mereka menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan keyakinan terhadap calon

legislatif atau calon pemimpin yang mereka yakini. Pendekatan ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan warga desa oleh pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok strategis, organisasi masyarakat dan bawaslu.

Strategi berikutnya yaitu dengan mengeluarkan peraturan kepala desa Sardonoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Anti Politik Uang. Hal ini akan membantu memberikan solusi untuk mengatasi praktik-praktik politik uang. Melalui peraturan kepala desa tersebut diharapkan warga bisa memahami dan melaksanakan salah satu program desa tersebut. Strategi selanjutnya yaitu dengan pelaksanaan sosialisasi secara tertulis yang dilakukan dengan cara pemasangan banner dan juga pemasangan pamflet di tempat-tempat strategis. Hal ini akan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara berkala, dikarenakan pemasangan banner, spanduk dan juga pamflet akan lebih bertahan lama dalam memberikan informasi kepada warga. Strategi yang selanjutnya adalah dengan memberikan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan ulama agar ikut membantu menguarakan anti politik uang.

c. Strategi dalam bentuk kegiatan lain  
Strategi lain dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terencanakan oleh bawaslu maupun perangkat desa setempat. Hasil dari wawancara diketahui strategi tambahan lain yaitu dengan cara pendekatan keagamaan. Melalui tokoh agama diharapkan masyarakat bisa memahami dampak buruk dari politik uang. Selain itu, juga dilakukan pemantauan kepada kegiatan-kegiatan kampanye agar bebas dari politik uang. Bawaslu dan perangkat Desa bekerjasama dengan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait.

2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Upaya mewujudkan Desa Anti Politik

Politik uang merupakan kegiatan yang sudah cukup mengakar di negara Indonesia, apalagi dalam kegiatan pemilu merupakan sebuah hal yang menjadi biasa bagi caleg untuk bermain politik uang, sehingga untuk memerangi dan menerapkan sebuah wilayah anti politik uang tidak akan mudah, banyak kendala yang akan dihadapi salah satunya pihak desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan desa anti politik uang cukup beragam, yaitu sebagai berikut.

a. Kendala dibidang SDM

Kendala berdasarkan bidang SDM ditunjukkan dengan keberagaman SDM yang ada di desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Hal ini tentu saja menjadi kendala yang cukup kompleks untuk menerapkan Desa Anti Politik Uang. Sumber daya manusia yang kurang cerdas atau rendah dalam berfikir tentu saja akan mudah terbujuk dengan adanya iming-iming sebuah hadiah baik berupa uang maupun barang. Berdasarkan hasil wawancara dari kepala desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman diketahui bahwa masyarakat di desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa, belum bekerja dan karyawan swasta. Hal tersebut yang menunjukkan jika SDM di desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman cukup beragam.

b. Kendala dalam bidang sosial budaya  
Sosial budaya merupakan hubungan natara masyarakat itu sendiri dan juga adata yang ada dalam desa masing-masing. Hasil wawancara dengan warga masyarakat diketahui bahwa rasa sungkan dan tidak enak jika menolak pemberian, hal tersebut yang menjadikan masyarakat kadang masih menerima pemberian dari caleg baik berupa barang dan juga uang. Rasa sungkan ini yang kadang masih menjadi

budaya bagi mereka yang dianggap sebagai sebuah rasa sosial kepada sesama manusia.

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang. Keterkaitan antara satu dengan yang lain juga dapat mempengaruhi penerapan desa anti politik uang. Misalnya jika ada beberapa tokoh masyarakat yang terlibat politik uang hal tersebut juga bisa mempengaruhi beberapa masyarakat lainnya.

c. Kendala dalam bidang Pendidikan

Sesuai dengan pemaparan dari kepala desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman diketahui bahwa mayoritas masyarakat Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman adalah lulusan SLTA, dan bahkan beberapa mayoritas warga yang sudah lansia merupakan lulusan SD dan bahan dulunya tidak sekolah. Pendidikan yang di miliki masyarakat sangat beragam. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai Pendidikan tinggi tidak bisa berfikir cerdas sehingga banyak masyarakat yang masih mudah untuk terbujuk dengan politik uang. Tentu saja ini menjadi kendala tersendiri, selain itu dengan pendidikan tersebut membuat masyarakat sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta, kehidupan mereka mempunyai penghasilan yang pas-pasan atau hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari jadi akan mudah bagi mereka mendapat pemberian dari caleg dengan dalih pemberian bantuan.

d. Kendala Dalam Bidang Anggaran  
Anggran berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak bawaslu dan desa

Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk mensukseskan dan menerapkan desa sebagai anti politik uang. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kendala berdasarkan anggaran dibuktikan dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sosialisai mengenai anti politikuang. Baik anggaran dari desa maupun bawaslunya hanya sedikit anggran yang dialokasikan Anggran pemilu hanya untuk logistik dan juga anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggrakan. Padahal untuk mengadakan sosialisasi secara rutin membutuhkan banyak anggaran.

### 3. Solusi Untuk Mengatasi Masalah Yang Dihadapi Pemerintah Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Desa Anti Politik Uang

#### a. Solusi di bidang SDM

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa solusi untuk mengatasi sumber daya manusia adalah dengan isu agama. Artinya bahwa mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk ikut berkampanye menyuarakan mengenai politik uang adalah “haram atau dosa”. Hal tersebut dikarenakan ucapan para ulama lebih mudah di terima oleh masyarakat pada umumnya. Untuk mengatasi sumber daya manusianya yang kurang ini memang cukup sulit, karena juga berkaitan dengan karakter dan watak dari manusianya masing-masing. Selain itu bisa di cegah dengan cara menerpakan upaya yang tegas kepada mayarakat bahwa suap atau politik uang, sanksi yang tegas harus diterapkan.

#### b. Solusi di bidang Sosial Budaya

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa solusi berdasarkan untuk mengatasi dari bidang sosial budaya adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga menerapkan budaya malu kepada masyarakat jika ketahuan ikut terlibat dalam politik uang.

#### c. Solusi dibidang Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa solusi dari bidang pendidikan yaitu dengan cara memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang politik dan hal-hal

yang berkaitan dengan larang dalam berpolitik. Dan untuk program jangka panjang harusnya bisa dikenalkan kepada msyarakat sejak dini atau sejak usia anak menginjak remaja. Hal tersebut akan bermanfaat untuk kedepannya. Meskipun banyak orang yang tidak sekolah sampai perguruan tinggi, tetapi pemahaman mengenai dunia politik akan luas.

#### d. Solusi dibidang anggaran

Berdasarkan hasil wawancara diketahui anggran menjadi salah satu kendala yang cukup berati. Hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran untuk mensosialisasikan anti politik uang, sehingga untuk mensiasati minimnya anggaran ini hal-hal yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi secara lisan saat ada pertemuan-pertemuan warga, membuat banner, stiker, dan spanduk.

### Pembahasan

Politik uang merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau imbalan lainnya kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Dapat dikatakan bahwa money politic yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih.

Tindakan politik uang merupakan tindakan yang tidak baik, tindakan politik uang ini biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang tertetntu guna menarik simpati dari orang lain. Kegiatan politik uang ini biasanya dilakukan oleh calon-calon legislative atau pemimpn pada pemilu, salah satunya pada sat pemilu tahun 2019. Salah satu daerah yang beretikat baik dalam menangulangi politik uang adalah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Pada pemilu tahun 2019, desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman cukup berhasil memberikan sosialisasi dan desa

Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman anti money politic.

1. Strategi Pemerintah Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic

Strategi merupakan sebuah garis besar, perencanaan, manajemen, taktik untuk mencapai tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman mempunyai beberapa strategi untuk dalam mewujudkan desa sebagai anti politik uang. Beberapa diantaranya adalah memberikan penyuluhan secara lisan kepada masyarakat, membuat publikasi secara tertulis (banner, spanduk dan pamflet), pemantauan terhadap kampanye yang dilakukan oleh calon legislative atau calon pemimpin tertentu.

Sehingga berdasarkan dari wawancara dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan adalah Program strategy (Strategi Program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Menunjukkan jika desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tidak banyak mempunyai program dan strategi untuk mewujudkan desa anti politik uang, akan tetapi dihiparkakan dengan adanya sedikit program yang dijalankan akan berdampak baik untuk semua kalangan baik warga masyarakat desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan juga bagi pemerintah daerah disekitarnya dan bias menjadi contoh bagi yang lain.

2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Upaya mewujudkan Desa Anti Politik

Berbagai macam kendala yang dihadapi desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik uang, diantaranya kendala yang berasal dari SDM, kendala yang berasal dari sosial

budaya, kendala yang berasal dari Pendidikan dan kendala yang berasal dari anggaran. Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Bagian yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seperti halnya di Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang sebegini besar masyarakatnya adalah petani atau buruh, sehingga dapat dikatakan mereka pengahasilan mereka pas-pasan. Tentu saja hal tersebut akan menjadi peluang untuk menerapkan politik uang, rakyat yang miskin dan membutuhkan pasti tidak akan berfikir panjang ketika ditawari uang atau bantuan sebagian besar warga akan menerimanya.

Masalah pendidikan juga menjadi masalah yang akan sulit untuk di pecahkan. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu, cenderung tidak mengenal partai dan calon anggota legislatif, tidak masalah, bahkan, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat

akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

### 3. Solusi Untuk Mengatasi Masalah yang Dihadapi Pemerintah Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic

Berdasarkan hasil dari wawancara telah diketahui bahwa beberapa solusi untuk mengurangi politik uang di desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman antara lain

- 1) Solusi dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai politik uang,
- 2) Solusi dibidang Sosial dan Budaya yaitu dengan bekerja sama dengan organisasi yang ada di desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman,
- 3) Solusi di bidang pendidikan yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang pendidikan politik khususnya politik uang kepada masyarakat dengan cara-cara yang mudah dimengerti,
- 4) Solusi dibidang anggaran yaitu dengan menghemat biaya anggaran dan melakukan swadaya masyarakat. Jika politik uang dapat dihindari maka akan tercapai asa pemilu. Jujur, artinya setiap warga negara berhak memilih bakal calon pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruh dari pihak lain.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Praktik politik uang sudah menjadi hal yang biasa dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Politik uang merupakan salah satu cara yang paling instan untuk memperoleh suara pemilih. Namun di sisi lain, politik uang menghasilkan kualitas pemimpin yang tidak baik. Maka dari itu, Pemerintah Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman ingin mewujudkan desa yang bersih dari praktik Politik Uang pada saat pemilu serentak Tahun 2019 yaitu dengan cara menerapkan

program Desa Anti Politik Uang yang bekerja sama dengan bawaslu, kelompok warga strategis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat dan perguruan tinggi..

Strategi yang digunakan Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Desa Anti Politik Uang adalah Program strategy (Strategi Program). Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah memberikan penyuluhan secara lisan atau sosialisasi kepada masyarakat, membuat publikasi secara tertulis (banner, spanduk dan pamflet), pemantauan terhadap kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif atau calon pemimpin tertentu.

Selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Upaya mewujudkan Desa Anti Politik Uang yaitu sebagai berikut,

- 1) Kendala dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia yang beragam,
- 2) Kendala dibidang sosial budaya yaitu masih adanya masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan kebudayaan pada saat pemilu. Selanjutnya adanya budaya dari masyarakat dimana apabila diberi sesuatu maka masyarakat tidak boleh menolaknya.
- 3) Kendala dibidang pendidikan yaitu masih ada beberapa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.
- 4) Kendala dibidang anggaran yaitu minimnya anggaran yang dikeluarkan baik dari Bawaslu maupun dari Pemerintah Desa.

Adapun solusi Untuk mengatasi masalah yang dihadapi pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut;

- 1) Solusi dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai politik uang,
- 2) Solusi dibidang Sosial dan Budaya yaitu dengan bekerjasama dengan organisasi masyarakat,
- 3) Solusi di bidang pendidikan yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang pendidikan politik khususnya politik uang kepada masyarakat dengan cara-cara yang mudah dimengerti,
- 4) Solusi dibidang anggaran yaitu dengan

menghemat biaya anggaran dan melakukan swadaya masyarakat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik uang pada pemilu serentak tahun 2019, maka terdapat beberapa saran sebagai bentuk sumbangsih untuk mewujudkan desa anti politik uang. Saran pertama diberikan kepada masyarakat Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari program desa anti politik uang. Saran kedua diberikan kepada pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sebagai Lembaga Pemerinah Desa. Adapun saran yang diberikan yaitu;

1. Bagi masyarakat desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman

a. Berperan aktif dan bahu membahu dengan pemerintah desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam mewujudkan desa anti politik uang sehingga dapat mewujudkan desa anti politik uang seperti yang didambakan oleh setiap warga masyarakat.

b. Tetap berpegang teguh atau berkomitmen pada peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Anti Politik Uang tentang desa anti politik uang, sehingga bisa memberikan contoh kepada desa-desa yang lain agar bisa mewujudkan desa anti politik uang seperti di desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

2. Bagi Pemerintah Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman

a. Melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan warga masyarakat sebagai upaya mewujudkan desa anti politik uang perlu ditingkatkan dari aspek inovasinya. Selain melakukan sosialisai hendaknya pemerintah desa bisa melakukan kegiatan yang berbentuk hiburan

maupun kegiatan yang menarik bagi warga masyarakat.

b. Melakukan persiapan anggaran keuangan yang memadai, sehingga dalam menjalankan setiap program mewujudkan desa anti politik uang bisa maksimal.

c. Membuat rancangan program yang lebih jelas serta berkelanjutan tentang menolak dan melawan money politic.

d. Membuat sanksi – sanksi yang jelas bagi masyarakat yang terlibat politik uang ataupun kandidat yang melakukan politik uang.

e. Memperkuat gerakan desa anti politik uang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2011. Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda.
- Cholisin, Nasiwan, 2013. Dasar dasar ilmu politik, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Semma Mansur. 2008. Negara dan korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setyawan, D., & Adiwidjaja, I. 2013. Strategi meningkatkan keadaran politik dan menolak money politic pemilih pemula pada pilkada kota Malang. Jurnal Reformasi, 3(2), 90-95.
- Sudrajat, Ajat. 2011. Khazanah intelektual politik Islam. Yogyakarta: Truemedia Utama.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta